

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari peninjauan dan pembahasan di atas mengenai pengelolaan kas daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi COVID-19, maka dapat ditarik simpulan yang dituangkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwasanya pengelolaan kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada masa pandemi COVID-19 dapat dikatakan sudah sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori praktis yang berlaku. Pengelolaan kas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan manajemen kas dalam bentuk optimalisasi kas yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melakukan berbagai cara agar penerimaan dan pengeluaran kas dapat ditangani dengan lebih baik selama masa ketidakpastian yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 berlangsung. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan agar

optimalisasi kas selama masa pandemi tetap berada *on track* atau di jalur yang semestinya.

2. Dalam rangka pengelolaan Rekening Kas Daerah Provinsi NTB dalam mengelola ketersediaan kas yang ada selama pandemi, pengelolaan Rekening Kas Daerah Provinsi NTB dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pelayanan Perbendaharaan yang di dalamnya meliputi fungsi pengusahaan dan pengaturan pengelolaan kas yang diperlukan pada pelaksanaan APBD dan pelaksanaan penempatan uang daerah dan menatausahakannya menjadi investasi jangka pendek daerah. Terdapat beberapa perubahan tergolong signifikan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola ketersediaan kas yang ada. Perubahan-perubahan tersebut meliputi sebelum pandemi berlangsung, pengelolaan kas pemerintah daerah Provinsi NTB dilaksanakan untuk membiayai program-program kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Saat pandemi berlangsung, tepatnya di tahun 2020 dan 2021, fokus pengelolaan kas pemerintah daerah Provinsi NTB dilaksanakan untuk membiayai program kegiatan penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi akibat dari dampak COVID-19. Dalam mengelola ketersediaan kas selama masa pandemi, pengelolaan Rekening Kas Daerah Provinsi NTB juga didukung dengan adanya kehadiran data *real time* terkait kas melalui suatu aplikasi. Pada aplikasi Dashboard Keuangan Daerah tersebut, tertera data *real time* terkait Kas Daerah yang meliputi RKUD dan

Deposito, Realisasi Pendapatan Daerah, dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta *record* atau catatan dari transaksi keuangan daerah.

3. Dalam pengelolaan kas selama pandemi, BPKAD Provinsi NTB menemui beberapa kendala. Kendala yang terjadi dapat berupa diperlukannya waktu untuk proses penyesuaian atau transisi dari sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung. Kemudian, salah satu kendala utama yang dihadapi tersebut secara rinci dipetakan ke dalam satu aspek yang menjadi fokus utama, yakni permasalahan manajemen kas berupa penatausahaan penerimaan kas dalam hal estimasi realisasi penerimaan atau pendapatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, yang meliputi penerbitan SPD secara bertahap guna menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, memperhatikan ketersediaan kas riil pada RKUD sebelum menerbitkan SP2D, melakukan pemantauan ketersediaan kas berupa penerimaan harian daerah, melakukan percepatan belanja, mengalokasikan dana pada kas untuk refocusing, dan meningkatkan sektor pengawasan dalam hal ini monitoring dan evaluasi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan terkait Tinjauan Pengelolaan Kas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi COVID-19 yang telah diuraikan, penulis memberikan saran bahwasanya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dapat meningkatkan mengoptimalkan pengelolaan kas di masa ketidakpastiaan saat ini, dengan melaksanakan pengoptimalan dalam manajemen kas dan keuangan daerah guna

mendukung keberhasilan pengelolaan kas yang ada. Kemudian pemerintah daerah juga harus dapat meningkatkan kembali upaya-upaya yang sebelumnya telah dilakukan secara maksimal dalam mengelola kas yang ada berdasarkan teori praktis. Sehingga kedepannya apabila hal-hal yang tidak dapat dihindarkan datang kembali, status dari pemerintah daerah adalah sudah siap untuk mempertahankan kestabilan fiskal yang ada pada daerahnya. Selanjutnya, pemerintah daerah harus dapat melihat dan memaksimalkan segala potensi yang ada dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.